

BHINNEKA TUNGGAL IKA DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ANALITIK

Rizal Mustansyir
Tenaga Pengajar Fakultas Filsafat UGM

Bhinneka Tunggal Ika merupakan pernyataan jiwa dan semangat bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kesatuan, meskipun negara dan bangsa Indonesia terdiri dari berbagai unsur dan suku yang beranekaragam. Semboyan itu merumuskan dengan tegas adanya harmoni antara 'hal satu' dan 'hal banyak', kesatuan dan kemajemukan. Keanekaragaman di dalam segala aspek kehidupannya tidak dilihat sebagai ancaman bagi kesatuan bangsa Indonesia, tetapi justru diharapkan mampu berperan sebagai sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya (Hardono Hadi, 1993; 61).

Aktivitas bahasa merupakan ciri khas manusia dan melalui bahasa itu pula manusia dapat melaksanakan refleksi dan kebebasannya (Paul Chauchard, 1983; 11). Gadamer bahkan mengatakan bahwa bahasa merupakan modus operandi dari cara manusia berada di dunia dan merupakan wujud yang seakan-akan merangkul seluruh konstitusi tentang dunia itu (Sumaryono, 1993; 26). Bahasa, apa pun alasannya harus diakui memainkan peran sangat besar dalam kehidupan manusia.

Manusia itu senantiasa hidup dalam gerak dan perubahan. Gerak dan perubahan menimbulkan keanekaragaman. Keanekaragaman tak pelak lagi akan menimbulkan perbedaan-perbedaan. Keanekaragaman ini dapat menjadi pemicu konflik manakala tidak dapat dijalin komunikasi yang baik. Oleh karena itu manusia hidup pasti membutuhkan komunikasi, salah satu bentuk komunikasi antar manusia adalah bahasa. Hidup adalah berkomunikasi, sedangkan mati adalah isolasi. Komunikasi sebagai dasar relasi berupaya mengatasi perbedaan, tanpa menegasikan eksistensi individu. Komunikasi yang berhasil senantiasa berlangsung dalam semangat saling menghargai antar individu, antar kelompok

sebagai upaya mendekati diri pada kepentingan bersama dan mencegah timbulnya konflik. Komunikasi akan berhasil dalam bahasa yang diakomodasikan secara kontekstual.

Bahasa merupakan tema sentral perbincangan para filsuf analitik, corak filsafat yang demikian ini dinamakan logosentrisme (Harry Hamersma, 1983; 141). Ada dua kelompok dalam aliran analitika bahasa yang memberikan titik tekan yang berbeda terhadap aspek sintaktik, semantik dan pragmatik. Kelompok pertama lebih mengarahkan perhatian mereka terhadap masalah sintaktik dan semantik. Kelompok ini beranggapan bahwa bahasa sehari-hari (ordinary language) tidak memadai (inadequate) untuk dipakai sebagai sarana bagi pengungkapan ide-ide kefilosofan (Alston, 1964;5). Bahasa sehari-hari mengandung banyak kelemahan, seperti: berwayuharti atau bermaknaganda (ambiguity), menyesatkan (misleadingness), kabur (vague), sehingga perlu disusun suatu jenis bahasa khusus yang bersifat logis, univok dan seragam (uniformity) bagi bidang filsafat. Kelompok kedua lebih mengarahkan perhatian mereka pada aspek pragmatik atau penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-

hari. Kelompok ini beranggapan bahwa bahasa sehari-hari (ordinary language) sudah cukup memadai (adequate) untuk menyampaikan ide-ide kefilosofatan, sejauh diberi penjelasan kalau ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi (Alston, 1964; 4). Bahasa sehari-hari mengandung nuansa filosofati dan tak ubahnya dengan samudera kehidupan yang tidak pernah kering dari problema filosofati. Keberagaman (pluriformity) penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari justeru sebagai kekayaan yang tak ternilai harganya.

Wittgenstein, salah seorang filsuf analitik di abad kedua puluh, mewakili kedua kelompok itu melalui perkembangan pemikirannya dalam dua periode. Arah pemikiran Wittgenstein periode pertama adalah menentukan bahasa ideal yang seragam (uniformity) bagi filsafat. Arah pemikiran Wittgenstein periode kedua adalah menggambarkan kenyataan yang sesungguhnya yang beranekaragam (pluriformity). Kedua arah pemikiran Wittgenstein ini kiranya mengandung dasar filosofik tentang persoalan Unity dan Plurality.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan pernyataan jiwa dan semangat bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kesatuan, meskipun negara dan bangsa Indonesia terdiri dari berbagai unsur dan suku yang beranekaragam. Semboyan itu merumuskan dengan tegas adanya harmoni antara 'hal satu' dan 'hal banyak', kesatuan dan kemajemukan. Keanekaragaman di dalam segala aspek kehidupannya tidak dilihat sebagai ancaman bagi kesatuan bangsa Indonesia, tetapi justeru diharapkan mampu berperan sebagai sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya (Hardono Hadi, 1993; 61).

Bagaimana penjelasan secara filosofik tentang aspek kesatuan dan kemajemukan

dalam Bhinneka Tunggal Ika? Di sini perkembangan pemikiran Wittgenstein sebagai tokoh yang mewakili mazhab analitika bahasa, dapat dipakai sebagai salah satu sarana refleksi atas Bhinneka Tunggal Ika, namun terlebih dahulu akan dilacak persoalan hal Satu dan hal Banyak dalam perkembangan sejarah Filsafat Barat.

Pembahasan

1. Problem The One & The Many Dalam Filsafat Barat

Hal satu (the One) dan hal banyak (the Many) merupakan problem metafisika yang menyita perhatian banyak filsuf sejak jaman Yunani kuno hingga filsuf kontemporer dewasa ini. Para filsuf yang menekankan kesatuan realitas atau bertitik tolak dari hal satu dalam memahami realitas dinamakan monisme, sedangkan pluralisme adalah pandangan yang menganggap bahwa ada lebih dari dua prinsip azali sebagai suatu hakikat (Bdk. Paul Edwards, 1967; 363-364). Bakker mengibaratkan pandangan monisme dengan "bubur", sedangkan pluralisme dikiasikan dengan pandangan "pasir". Baik monisme maupun pluralisme dapat bersifat spiritualistik maupun materialistik. Monisme mutlak menyusutkan sedapat mungkin segala kegandaan dan kecamaragaman, sehingga hanya tinggal satu realitas tunggal, entah materi atau roh. Sebaliknya pluralisme mutlak menghapus sedapat mungkin segala kesatuan dan keseragaman, sehingga hanya tinggal kejamakan mutlak, yaitu pecahan, entah pecahan materi atau titik-titik rohani. Setiap pengada berdikari, tanpa kesatuan apa pun dengan yang lain. Tetapi baik monisme mutlak maupun pluralisme mustahil dipertahankan, sehingga yang ada hanya monisme lunak dan pluralisme lunak atau tendensi monistik dan pluralistik. Monisme lunak menganggap hanya ada satu pengada, entah materi atau roh

yang meliputi keseluruhan kenyataan. Segala bentuk monisme menekankan kesatuan dalam keanekaan. Sebaliknya pluralisme lunak menganggap kenyataan itu jamak dan beranekaragam dan terdiri dari unit-unit yang serba otonom dan tanpa hubungan intrinsik. Kalau dirunut lebih jauh, maka pandangan masing-masing filsuf mengenai hal satu dan hal banyak itu memiliki perbedaan-perbedaan yang cukup tegas (1993; 27, 30).

Pandangan Plato tentang hal satu dan hal banyak bertitik tolak dari upayanya untuk merumuskan kenyataan atau realitas, yakni hal ada (Being) dan hal menjadi (becoming). Tujuan utamanya adalah untuk mendukung kebenaran pengetahuan. Kebenaran pengetahuan bagi Plato hanya ditemukan dalam dunia ide, yaitu dunia yang bersifat tetap, satu dan tak terbagi. Disini terlihat adanya keterkaitan yang erat antara metafisika dengan epistemologi, antara realitas dengan pengetahuan, antara kenyataan dengan kebenaran (Sontag, 1970; 32).

Realitas bagi Plato hanya satu (the One), yaitu dunia ide, sesuatu yang kekal dan tidak berubah, sedangkan dunia bayang-bayang mengacu pada "yang banyak" (The Many). Aristoteles mengembangkan konsep Plato mengenai The One dan The Many. Kenyataan bagi Aristoteles mengacu pada hal banyak. Kita mengenal pohon itu, pohon ini, dan seterusnya, dalam pengertian tunggal, bukan umum. Pembahasan metafisik Aristoteles diarahkan pada prinsip pertama. Metafisika baginya adalah studi mengenai "ada" sebagai "ada" (Being as Being) (White, 1987; 32).

Plotinus mengembangkan ajaran Plato tentang "hal satu" dalam rangka mendukung pandangannya tentang adanya hirarki dalam realitas. Hirarki yang tertinggi, yang menjadi muara dari seluruh kenyataan yang ada dinamakannya *to Hen*, merupakan puncak

kesatuan dari segala yang ada (Sontag, 1970; 58). *To Hen* atau *The One* dalam filsafat Plotinus mengacu pada gagasan mengenai Tuhan. *The One* adalah kebaikan yang merupakan tujuan hidup manusia. *The One* adalah Yang Esa, yang segala sesuatu ikut ambil bagian di dalamnya, sepanjang segala sesuatu itu ada (Delgaauw, 1992; 46).

Problem-problem *The One* dan *The Many* dalam pandangan ketiga filsuf ini merupakan problem murni metafisika, yang memicu polemik di kalangan para filsuf. Sehingga para filsuf dapat dibedakan menjadi dua pandangan di dalam memandang realitas. Pandangan pertama disebut dengan monisme, yaitu pandangan yang menganggap adanya satu kenyataan dasar yang membentuk struktur alam semesta ini secara menyeluruh. Pandangan kedua dinamakan pluralisme, yaitu pandangan yang menganggap bahwa kenyataan itu terdiri atas banyak substansi.

Kant mengangkat problem *Unity* dan *Plurality* dalam kerangka epistemologi. Kesatuan sistem pemikiran melalui rasio murni (*pure reason*) bagi Kant merupakan syarat mutlak bagi upaya pemahaman atas realitas. Kant menolak metafisika yang diarahkan pada upaya memahami sesuatu yang ada dalam dirinya sendiri (*Das ding an sich*). Kant menganggap metafisika itu sebagai suatu bentuk kegiatan akal budi yang semata-mata ditujukan terhadap serta mengenal dirinya sendiri. Kalau metafisika sebelum Kant membicarakan mengenai objek-objek, maka metafisika Kant membicarakan mengenai sistem kaidah berpikir, cara-cara mengetahui yang dipunyai akal budi manusia (Froe, 1984; 34). Kant menegaskan bahwa yang penting adalah menyusun kategori-kategori pemikiran yang dapat menjelaskan dunia fenomena. Penyusunan itu diungkapkan dalam bentuk putusan yang berlaku umum, bersifat mutlak dan mengandung kebaruan.

Hal itu disebut putusan sintetik a priori. Filsafat Kant dinamakan Filsafat Transendental, artinya ide suatu ilmu pengetahuan di mana kritik akal murni (*Critique of Pure Reason*) harus membuat seluruh rencana secara arsitekonis, yaitu dari prinsip-prinsip dengan jaminan penuh bagi validitas dan stabilitas semua bagian yang membentuk bangunan itu. Itulah yang dimaksud dengan sistem semua prinsip akal murni (Kant, 1991; 39).

Sistem pemikiran versi Kant ini dikembangkan oleh Hegel untuk mendukung pemikiran tentang Roh Absolut. Semua gerak yang ada dalam kenyataan ini pada akhirnya menuju pada kesatuan pada Roh yang Absolut. Roh Tuhan menurut Hegel adalah ide absolut yang menciptakan semua realitas melalui pengasingan (*alienating*) substansinya dalam dunia alamiah dan dunia manusia. Setelah pengasingan substansi itu dalam dunia realitas, ide absolut secara progresif mengasumsikan kembali substansinya ke dalam dirinya sendiri dan kemudian tiba pada kesadaran diri sepenuhnya atau roh mutlak. Oleh karena itu seluruh realitas adalah rasional dalam beberapa cara, sebab ide diaktualisasikan di dalamnya (Sullivan, 1970; 40).

Cassirer memperluas pandangan Kant dengan menekankan pada usaha mencari kesatuan dasar dunia ideal. Bahasa, kesenian, religi dan ilmu pengetahuan merupakan tahap dalam proses maju ke arah pembebasan diri manusia. Sehingga kebudayaan merupakan wahana pengembangan diri manusia. Sintesa filosofis ditawarkan untuk mengatasi hal-hal yang tampaknya bertentangan. Tetapi sintesa filosofis punya arti berbeda. Di situ kita tidak mencari kesatuan tindakan; bukan keseragaman produk melainkan keseragaman proses kreatif (Cassirer, 1987; 108).

Perbincangan hal satu dan hal banyak dalam pandangan para filsuf di atas mendapat tanggapan yang berbeda-beda dalam berbagai aliran pemikiran filsafat kontemporer. Salah satu aliran filsafat yang sconcert pada masalah hal satu dan hal banyak ini adalah aliran analitika bahasa. Perbincangan mengenai hal itu lebih menajam dalam pandangan salah seorang tokoh analitika bahasa, yaitu Wittgenstein.

2. Perkembangan Pemikiran Wittgenstein

Wittgenstein termasuk salah seorang filsuf analitik yang concern dengan persoalan bahasa dalam bidang filsafat.

Perkembangan pemikiran Wittgenstein sebagai tokoh filsafat bahasa dapat dibagi ke dalam dua tahapan yang berlainan prinsip satu sama lain. Wittgenstein I dalam karyanya *Tractatus Logico-Philosophicus* berupaya menentukan suatu bahasa ideal bagi filsafat yaitu, suatu bahasa yang didasarkan pada logika bahasa yang sempurna, bermakna univok, dan terbatas (Wittgenstein, 1969; 7). Wittgenstein dalam periode ini mendambakan bahasa yang seragam (*uniformity*) dalam bidang filsafat, agar para filsuf terhindar dari kerancuan bahasa. Wittgenstein I mencoba menangkap dasar kesatuan melalui bahasa ideal, sehingga dasar pemikiran lebih bersifat konseptual. Dalil bahwa ada paralelitas antara bahasa dengan realitas, artinya bahasa dipandang sebagai gambar atau cermin realitas (Pitcher, 1964; 78).

Perubahan radikal terjadi dalam pemikiran Wittgenstein pada permulaan tahap kedua, ketika Wittgenstein melihat pluriformitas justeru lebih menonjol dalam kehidupan konkret. Usaha univokalitas dalam pemikiran Wittgenstein I ditinggalkan, sebab Wittgenstein II lebih menekankan pada

penggunaan bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari mengandung begitu banyak keberagaman yang membentuk permainan bahasa (language-games) (Lyotard, 1989; 10 ; Charlesworth, 1959; 104). Pluriformitas merupakan kenyataan kongkrit yang tak terbantahkan. Ada begitu banyak permainan bahasa yang berlangsung sesuai dengan aturan mainnya masing-masing. Peranan penting sebuah aturan permainan dicontohkan dalam permainan catur (Wittgenstein, 1983; 12, 150). Wittgenstein II mencoba menangkap realitas sebagaimana adanya, sehingga dasar pemikirannya lebih bersifat realistik.

Perkembangan pemikiran filsafati Wittgenstein menampakkan perubahan arah yang cukup mendasar. Arah pemikiran Wittgenstein I pada uniformitas bahasa, sedangkan arah pemikiran Wittgenstein II pada pluriformitas bahasa. Pemikiran Wittgenstein I diletakkan atas dasar prasyarat-prasyarat logika bahasa dalam rangka menemukan bahasa ideal. Pemikiran Wittgenstein II didasarkan atas kenyataan kongkrit adanya keanekaragaman penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari, dan masing-masing memiliki makna sesuai dengan konteks penggunaannya (Charlesworth, 1959; 108).

Apabila kedua tahap pemikiran filsafati Wittgenstein ini dikaitkan dengan problem the One dan the Many, maka terlihat kecenderungan bahwa pandangan Wittgenstein secara keseluruhan memihak pada the Many atau pluralisme lunak, meskipun faktor the One dalam Wittgenstein I cukup mendapat perhatian yang besar dalam konteks bahasa ideal. Wittgenstein II yang mengetengahkan konsep language-games cenderung memihak pada pluralisme lunak, karena keberagaman dan perbedaan dipandang sebagai esensi. Unsur kesatuan (unity) hanya diberi perhatian kecil dalam

konsep family resemblances, kemiripan keluarga (Wittgenstein, 1983; 32).

Problem metafisika dalam pemikiran filsuf-filsuf klasik tentang hal satu (the One) dan hal banyak (the Many) yang diarahkan pada realitas ini dimodifikasi oleh Wittgenstein untuk diterapkan dalam problem kebahasaan. Realitas dalam pandangan para filsuf analitik identik dengan persoalan bahasa. Bahasa dalam filsafat kontemporer, memainkan peranan yang dapat dibandingkan dengan being dalam filsafat klasik. Bertens menyatakan bahwa memang terdapat kemiripan tertentu antara bahasa dengan being, yakni sama-sama bersifat universal. Being adalah universal dari sudut objektif, sedangkan bahasa universal dari sudut subjektif, karena bahasa meliputi segala sesuatu yang dikatakan atau diungkapkan; makna atau arti hanya bisa timbul dalam hubungan dengan bahasa (Bertens, 1987; 123).

Problem kesatuan dan keanekaan itu sendiri adalah problem filosofis yang bisa dirunut melalui perkembangan sejarah Filsafat Barat sejak Plato, yang mengetengahkan problem The One dan The Many, kemudian berkembang pada filsuf-filsuf yang tampil kemudian seperti: Kant, Hegel, Cassirer dengan problem Unity dan Plurality, sampai pada filsuf abad kedua puluh, termasuk Wittgenstein yang dalam kedua periode pemikirannya mengangkat uniformitas dan Pluriformitas bahasa sebagai sentral pemikiran filsafatnya. Persoalan mengenai kesatuan dan kemajemukan ini kiranya termuat pula dalam Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini pula yang akan ditelusuri lebih lanjut dalam penelitian ini.

3. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika

Istilah Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Sanskerta, "Bhinneka", "Tunggal"

dan "Ika". Kata "Bhinneka" berasal dari kata "Bhinna + Ika" yang berarti "berbeda-beda itu"; "Tunggal" artinya satu; "Ika" yang berarti "itu". Jadi istilah "Bhinneka Tunggal Ika" secara etimologis berarti: Berbeda-beda itu dalam satu itu. Kata itu yang pertama merupakan rangkaian dengan kata "Bhinna", yakni "berbeda-beda itu". Kata "itu" yang kedua secara deiktik mengacu pada bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika dalam arti yang luas yaitu, beranekaragam etnik, budaya dan agama, namun ada dalam kesatuan yakni bangsa Indonesia. Kesatuan di sini merupakan hasil kesepakatan bangsa Indonesia untuk mengatasi keanekaragaman yang ada, sehingga dapat mencegah timbulnya konflik. Bhinneka Tunggal Ika dalam hal ini mengandung aspek keharusan (das Sollen) bagi keutuhan bangsa Indonesia.

Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" ini tercantum dalam Kitab Sutasoma karya Empu Tantular dalam bait Kelima Canto CXXXIX yang berbunyi sebagai berikut.

Rwaneka dhatu winuwus wara Buddha
Wiswa

bhineki rakwa ring apan kena
parwanosen

mangkang Jinatwa kalawan Siwatwa
tunggal,

bhinneka tunggal ika tan hana Dharmma
mangrwa.

(it is said that the well-known Buddha
and Siwa are two different substances).

They are indeed different, yet how is it
possible to recognize their difference in a
glance,

since the Truth of Jina and (the Truth of)
Siwa is One.

They are indeed different, but they are of
the same kind, as there are no division in
Truth (Soewito, 1975: 81-82).

Istilah Bhinneka Tunggal Ika yang diambil dari kitab Sutasoma ini, dalam sejarah Majapahit (abad keempat belas), menunjukkan semangat toleransi kehidupan beragama pada masa itu, yang menempatkan dua agama besar - Hindu dan Budha - hidup secara bersama dengan rukun dan damai. Kedua agama besar itu beriringan di bawah payung kerajaan, pada jaman pemerintahan raja Hayam Wuruk. Oleh karena itu meskipun Budha dan Siwa merupakan dua substansi yang berbeda, namun perbedaan itu tidak menimbulkan perpecahan, karena kebenaran Budha dan kebenaran Siwa bermuara pada hal Satu. Mereka memang berbeda, tetapi sesungguhnya satu jenis, tidak ada perbedaan dalam kebenaran.

Penamaan kitab "Sutasoma" oleh Empu Tantular diambil dari nama seorang pangeran, yang konon sangat ahli dalam hal karang mengarang, ahli dalam hal tembang dan senang sekali dengan ajaran batin dan dianggap sebagai penjelmaan Budha di dunia (Sugriwa, 1959: 37-39). Sutasoma mencerminkan perpaduan yang harmonis antara kecerdasan seorang sastrawan dan kebijakan seorang pendeta.

Yamin (1960: 439-445) bertitik tolak dari ilmu Heraldik - ilmu yang mempelajari bentuk dan arti lukisan lencana - menyatakan bahwa seloka "Bhinneka Tunggal Ika", yang dilukiskan di bawah burung Garuda dan perisai Pancasila itu dipetik dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, yang hidup sejaman dengan pujangga Empu Prapanca dan negarawan prabu Hayam Wuruk dan Patih Gadjah Mada, di jaman kencana Indonesia pada abad XIV. Seloka itu hampir sama artinya dengan seloka dalam bahasa latin :Ex pluribus unum = Bersatu walaupun berbeda: berjenis-jenis tetapi tunggal.

Istilah *Bhinneka Tunggal Ika* yang semula menunjukkan semangat toleransi keagamaan ini, kemudian diangkat menjadi lambang Negara Indonesia, dan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.66 tahun 1951 Tentang Lambang Negara.

Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang negara Indonesia merupakan upaya untuk mempersatukan masyarakat yang majemuk dengan latar belakang budaya yang beragam. Eka Dharmaputera (1992: 44) menengarai bahwa pembahasan mengenai *Bhinneka Tunggal Ika* menunjukkan bahwa keanekaragaman maupun kesatuan Indonesia adalah kenyataan sekaligus persoalan. Setiap pembahasan tentang Indonesia yang mengabaikan kedua atau salah satu dimensi tersebut, dapatlah dipastikan tidak akan mencapai sasaran. *Bhinneka Tunggal Ika* juga berarti bahwa bahaya disintegrasi merupakan ancaman yang amat nyata, namun sekaligus integrasi bukanlah sesuatu yang mustahil. Integrasi adalah masalah pokok bagi masyarakat Indonesia, justeru karena integrasi mengasumsikan adanya pluralitas dan heterogenitas.

Kesatuan itu sendiri yang mengacu pada uniformitas, merupakan konsensus yang bukan bersifat spontan, tetapi mengalami proses historis yang panjang. Oleh karena itu baik konsep negara integralistik dari Soepomo, maupun peletakan sila Nasionalisme pada urutan pertama oleh Soekarno dalam sidang pertama BPUPKI, haruslah dipahami dalam situasi dan kondisi yang berlaku dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia (Yamin, 1960; 127). Kesatuan adalah upaya untuk menciptakan wadah yang mampu menyatukan kepelbagaian, keanekaan yang ada dalam kenyataan berupa aneka suku bangsa, aneka bahasa daerah, aneka agama yang dianut. Kesatuan adalah cerminan rasionalitas yang lebih menekankan kesamaan

daripada perbedaan, yang mengandung ide, tindakan dan keputusan subjek.

Bhinneka Tunggal Ika adalah cerminan keseimbangan antara unsur perbedaan yang menjadi ciri keanekaan dengan unsur kesamaan yang menjadi ciri keanekaan. Keseimbangan itu sendiri merupakan ruang gerak yang tidak dapat begitu saja ditentukan secara persis titik temunya. Keseimbangan bukan lah jawaban pasti dari perpaduan antara keanekaan dengan kesatuan seperti: dua tambah dua sama dengan empat. Keseimbangan itu sendiri merupakan konsep filsafati yang selalu terletak pada ketegangan diantara dua titik ekstrim, yaitu keanekaan mutlak di satu pihak, kesatuan mutlak di pihak lain. Setiap kali segi keanekaan yang menonjolkan perbedaan itu memuncak, maka kesatuan akan meredakan konflik yang mungkin timbul atas dasar kesadaran nasional. Demikian pula sebaliknya, manakala segi kesatuan yang menonjolkan kesamaan itu tampil secara berlebihan, maka keanekaan selalu mengingatkan bahwa perbedaan adalah kodrat yang tak terelakkan. Silih bergantinya peranan keanekaan dan kesatuan tak ubahnya silih bergantinya peranan siang dan malam. Keduanya mencerminkan realitas dalam eksistensi kehidupan manusia yang unik dan istimewa. Keduanya terekspresi secara filosofis dalam lambang negara Indonesia *Bhinneka Tunggal Ika*.

4. Perkembangan pemikiran Wittgenstein sebagai sarana refleksi atas *Bhinneka Tunggal Ika*

Uniformitas merupakan kunci pemikiran Wittgenstein dalam periode pertama. Tujuan Wittgenstein I adalah menyusun bahasa ideal untuk menghilangkan kekacauan bahasa dalam filsafat. Bahasa ideal yang dimaksud adalah bahasa yang tersusun atas proposisi-

proposisi logis yang mengandung makna univok dan terbatas, sehingga dapat terhindar dari ambiguitas, penyimpangan makna. Penyusunan bahasa ideal dengan tujuan menyatukan bahasa filsafat ini merupakan suatu upaya subjektif untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang berkembang dalam bahasa filsafat.

Makna kesatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika dapat dikatakan sebagai sebuah upaya ekspresi-refleksif pemikiran subjektif atas eksistensi bangsa Indonesia. Kesatuan merupakan sebuah gambaran ideal untuk mengangkat atau menempatkan unsur perbedaan yang terkandung dalam keanekaragaman bangsa Indonesia yang berupa: multi-etnik, multi-budaya dan multi-religi yang rawan konflik, ke dalam suatu wadah, yakni negara kesatuan Indonesia. Keanekaragaman bukannya diungkiri, hanya perlu disusun gambaran logis yang ideal bagi pemaknaan eksistensi bangsa Indonesia. Kesatuan adalah sebuah identitas yang menunjuk (deiktik) pada sesuatu.

Pluriformitas merupakan arah dan landasan gerak pemikiran Wittgenstein dalam periode kedua. Pemihakan pada pluriformitas ini menunjukkan bahwa Wittgenstein II lebih dekat kepada tradisi pemikiran empirisme daripada rasionalisme. Sebab dalam periode ini Wittgenstein mendasarkan pemikiran filsafatnya pada pengalaman kongkrit - terutama pada aspek kebahasaan - sebagai upaya menjaring keanekaragaman permainan bahasa. Tugas filsafat bagi Wittgenstein adalah menemukan, membedakan dan menepatkan aturan main dalam berbagai Language-games dengan bertitik tolak pada kenyataan yang ada.

Bhinneka Tunggal Ika sebagai cerminan keanekaragaman budaya bangsa Indonesia juga dapat dianalisis dengan konsep pluriformitas. Sebab pluriformitas adalah

gambaran objektif tentang realitas yang sesungguhnya. Keanekaragaman bangsa Indonesia adalah suatu kenyataan objektif. Keanekaragaman bahkan menyadarkan manusia akan adanya otonomi. Namun otonomi juga baru bermakna manakala ada relasi dalam kesatuan yang telah ditunjuk.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka inti pemikiran tesis ini dapat diringkas dalam butir-butir berikut.

Pertama, perkembangan pemikiran Wittgenstein dari periode pertama pada periode kedua menunjukkan adanya diskontinuitas. Diskontinuitas yang menunjukkan perubahan pola pikir yang semula menekankan pada bidang yang bersifat logis yang didasarkan atas logika bahasa yang sempurna (ciri pemikiran Wittgenstein I) kepada bidang yang bersifat empirik karena bertitik tolak dari bahasa sehari-hari yang memperlihatkan keanekaragaman bentuk permainan bahasa (ciri pemikiran Wittgenstein II). Diskontinuitas dalam arti penolakan Wittgenstein II atas pemikirannya terdahulu (Wittgenstein I) sesungguhnya menunjukkan adanya perkembangan tujuan dan arah pemikiran dari Wittgenstein I ke Wittgenstein II.

Kedua, Tujuan pemikiran Wittgenstein I adalah mengatasi kekacauan penggunaan bahasa dalam bidang filsafat. Arah pemikiran Wittgenstein I yaitu membentuk bahasa ideal, yakni bahasa yang didasari atas logika. Arah pemikiran Wittgenstein I adalah membentuk bahasa ideal yang memerlukan kondisi-kondisi tertentu (pre-conditioning) yang berupa pemaknaan secara univok. Tujuan pemikiran Wittgenstein II adalah menangkap realitas sesuai dengan kenyataan yang

sesungguhnya. Arah pemikiran Wittgenstein II yaitu menggambarkan realitas dengan menemukan, menepatkan dan membedakan aturan permainan dalam berbagai permainan bahasa (*Language-games*). Arah pemikiran Wittgenstein pada kedua periode dapat dipakai sebagai alat analisis bagi *Bhinneka Tunggal Ika* sesuai dengan problem yang dihadapi, yakni kesatuan dan keanekaragaman.

Ketiga, pemikiran filsafati Wittgenstein I yang terarah pada upaya mencari kesatuan bahasa ideal bagi filsafat. Namun kesatuan dalam *Bhinneka Tunggal Ika* adalah kesatuan tanpa paksaan, kesatuan yang tumbuh dari kesadaran akan makna pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesatuan dalam *Bhinneka Tunggal Ika* berarti kesatuan dalam keanekaragaman budaya bangsa Indonesia.

Pemikiran Wittgenstein II sebagai perkembangan pemikirannya menunjukkan perhatian yang besar terhadap realitas sesungguhnya, yakni keanekaragaman. Unsur keanekaragaman (*pluriformitas*) yang tercermin dalam teorema permainan bahasa merupakan salah satu alat analisis bagi konsep "berbeda-beda" dalam *Bhinneka Tunggal Ika*. Berbeda-beda merupakan ciri *pluriformitas*, sekaligus menunjukkan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Keanekaragaman adalah fakta kehidupan manusia yang merupakan kodrat-alami, mustahil untuk diingkari.

Keempat, harmoni antara kesatuan dan keanekaragaman dalam *Bhinneka Tunggal Ika* bersifat statis sekaligus dinamis. Aspek statis menekankan pada kesatuan atau kesamaan kesadaran, cita-cita, semangat dan tujuan. Kesatuan didasarkan pada kesamaan historis, yakni penderitaan yang sama-sama dialami dalam era penjajahan dan diwujudkan dalam keputusan. Aspek dinamis melihat perbedaan yang ada di antara berbagai suku bangsa itu

sebagai kenyataan kongkrit yang bersifat alamiah atau merupakan fakta kehidupan yang tak terbantahkan.

Kelima, Unsur kesatuan bersifat subjektif, karena merupakan upaya pemikiran manusia untuk menemukan kesamaan dalam perbedaan atau keseragaman dalam keanekaragaman. Arah pemikiran Wittgenstein I cenderung pada kesatuan atau uniformitas. Namun dalam perkembangan pemikirannya Wittgenstein II cenderung berpijak pada kenyataan konkret dan menerima perbedaan sebagai sesuatu yang wajar. *Bhinneka Tunggal Ika* yang mengandung arti berbeda-beda dalam satu itu mengandung aspek keanekaragaman dan kesatuan sekaligus. Aspek kesatuan bersifat subjektif-fungsional karena selalu atas dasar penunjukkan pada kenyataan suatu ide yang dihayati karena kesepakatan. Aspek keanekaragaman selalu bersifat objektif karena penunjukkan pada kenyataan yang berupa: multi-etnik, multi-budaya dan multi-religi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Perkembangan lebih lanjut dalam kehidupan bangsa Indonesia seyogyanya mengarah pada peningkatan kesadaran dan penghayatan kesatuan dalam kekayaan keanekaragaman. Sebab pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditegakkan atas dasar Pancasila mampu merangkul keanekaragaman atau perbedaan itu sebagai suatu kekayaan bangsa. Hal ini perlu dipertegas agar dapat menjadi bahan renungan lebih jauh dalam pemahaman atas makna lambang negara Indonesia, yakni *Bhinneka Tunggal Ika*. *Bhinneka Tunggal Ika* yang mengandung *Raison d'etre* (alasan keberadaannya) harus tetap dipahami dalam pengalaman historis bangsa Indonesia, karena kata "ika" dalam rangkaian istilah *Bhinneka Tunggal Ika* itu merupakan isyarat penunjukkan (*deiktik*) pada bangsa Indonesia.

2. Dalil-dalil

Uraian tesis ini didasarkan pada beberapa dalil sebagai titik tolak pemikiran, yaitu :

Pertama, hidup adalah gerak, gerak menimbulkan perubahan yang menuju ke suatu titik tertentu. Setiap kehidupan manusia pasti mempunyai tujuan - baik diungkapkan maupun tidak - sehingga gerak langkah manusia yang terencana mengarah pada pencapaian tujuan itu. Tujuan itu sendiri merupakan proses ke arah idealisasi.

Kedua, hidup adalah komunikasi sedangkan mati adalah isolasi. Manusia yang tidak mampu menjalin komunikasi berarti membunuh dirinya secara perlahan. Salah satu bentuk komunikasi yang menciptakan dan diciptakan manusia sebagai makhluk budaya adalah bahasa. Manusia senantiasa hidup dalam jaringan budaya yang ditenunnya sendiri.

Ketiga, bahasa adalah laboratorium para filsuf, tempat mereka menabur, menyemai dan mematangkan ide-idenya. Bahasa merupakan modus operandi dari cara manusia berada di dunia dan merupakan wujud yang seakan-akan merangkul seluruh konstitusi tentang dunia. Bahasa merupakan salah satu cerminan budaya suatu bangsa, karena melalui bahasa suatu bangsa mengekspresikan dan merefleksikan keberadaan dirinya di dunia.

Keempat, dunia adalah totalitas fakta. Fakta mengacu pada keberadaan bentuk-bentuk peristiwa. Fakta diungkapkan ke dalam proposisi. Proposisi selalu merupakan hasil pemikiran yang mengandung makna, karena proposisi bertitik tolak dari kenyataan.

Kelima, keanekaragaman adalah kenyataan yang tak terbantahkan, sehingga selalu bersifat objektif. Sedangkan kesatuan adalah sebuah proses yang berawal dari

subjek yang berpikir menuju titik idealisasi, sehingga kesatuan selalu konseptual.

Keenam, hidup manusia senantiasa berada pada ketegangan di antara dua titik ekstrim, yaitu kesatuan dan keanekaragaman. Setiap aspek kesatuan senantiasa bertitik tolak dari keanekaragaman. Setiap keanekaragaman berusaha menuju titik idealisasi ke arah kesatuan.

Ketujuh, Bhinneka Tunggal Ika, "berbeda-beda dalam satu itu" mengacu pada latar belakang historik bangsa Indonesia yang beranekaragam suku, adat istiadat dan agama. Keanekaragaman merupakan kekayaan bangsa, sekaligus merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia, yakni muara timbulnya konflik, perpecahan. Kesatuan merupakan pangkal tolak berpikir subjektif atas dasar ekspresi-refleksif, sehingga perbedaan diterima sebagai suatu kenyataan alamiah yang diarahkan secara konseptual ke arah titik idealisasi. Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan adanya otonomi dan relasi. Otonomi menghargai hak individu, sedangkan relasi menghargai hak sosial. Harmoni terletak di antara sifat kodrat manusia, yakni manusia sebagai makhluk individu berkembang secara paralel dengan manusia sebagai makhluk sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Alston, W.P., 1964, *Philosophy of Language*, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Bakker, Anton., 1992, *Ontologi: Metafisika Umum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Bertens, K., 1981, *Filsafat Barat Dalam Abad XX Jilid I*, Gramedia, Jakarta.
- Bertens, K., *Panorama Filsafat Modern*, Gramedia, Jakarta.
- Cassirer, Ernst., 1987, *An Essay on Man*, Diindonesiakan oleh: A.A.Nugroho (Manusia Dan Kebudayaan: Sebuah Esei Tentang Manusia), Gramedia, Jakarta.

- Charlesworth, M.J., 1959, *Philosophy And Linguistic Analysis*, Duquesne University, Pittsburgh.
- Chauchard, Paul., 1983, *Le langage et la Pensee*, diterjemahkan oleh: Widyamartaya, "Bahasa Dan Pikiran", Kanisius, Yogyakarta.
- Delfgaauw, Bernard., 1988, *Beknopte Geschiedenis der Wijsbegeerte*, Alih Bahasa: Soejono Soemargono (Sejarah Ringkas Filsafat Barat), Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Edwards, Paul., 1967, *The Encyclopedia of Philosophy*, The Macmillan Company & The Free Press, New York.
- Eka-Dharmaputera, 1992, *Pancasila Identitas Dan Modernitas*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Froe, A.de., 1984, *Apakah Filsafat itu?*, Alih Bahasa: Soejono Soemargono, Nur Cahaya, Yogyakarta.
- Hamersma, Harry., 1983, *Tokoh-tokoh Filsafat Barat Modern*, Gramedia, Jakarta.
- Hardono-Hadi, 1994, *Hakikat & Muatan Filsafat Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta.
- Harun-Hadiwijono., 1989, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, Cetakan kelima, Kanisius, Yogyakarta.
- Hendryk-Berybe, 1984, "Sikap Etis dalam Berbahasa: Suatu Persoalan", dalam *Basis*, Mei - 1984 - XXXiii - 6, Yayasan B.P. Basis, Yogyakarta.
- I-Gusti-Bagus-Sugriwa, 1959, *Sutasoma*, Pustaka Balimas, Denpasar.
- Ingleson, J., 1993, *Perhimpunan Indonesia Dan Pergerakan Kebangsaan*, Penerjemah: Nina Bakdisoemanto, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Jones, W.T., 1975, *The Twentieth Century to Wittgenstein and Sartre*, Second Edition, Harcourt Brace Jovanovich Inc., New York.
- Judowibowo-Poerwowidagdo., TT, *Filsafat Bahasa*, Diktat Kuliah pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Jujun-S-Suriasumantri, 1987, "Pembangunan Sosial Budaya Secara Terpadu", dalam *Masalah Sosial Budaya Tahun 2000*, Cetakan Kedua, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Kant, I., 1991, *Critique of Pure Reason*, terbit pertama kali tahun 1781, Translated by: J.M.D.Meiklejohn, J.M.Dent & Sons Ltd, London.
- Kerferd, G.B., 1967, "Aristotle" dalam Paul Edwards (ed.), *The Encyclopedia of Philosophy*, Vol. I, The Macmillan Company & The Press, New York.
- Koentjaraningrat, 1975, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, cetakan kedua, Gramedia, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1993, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Cetakan Keempatbelas, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1985, "Persepsi Tentang Kebudayaan Nasional", dalam *Alfian* (ed), *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan*, Gramedia, Jakarta.
- Koento-Wibisono, 1985, *Ilmu Filsafat Dan Aktualitasnya Dalam Pembangunan Nasional; Suatu Tinjauan dari Sudut Tradisi Pemikiran Barat*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Lorens-Bagus., 1991, *Metafisika*, Gramedia, Jakarta.
- Lorens-Bagus, 1992, "Ludwig Wittgenstein Masalah Bahasa dan Makna" dalam *Mudji Sutrisno dan Budi Hardiman* (eds), *Para Filsuf Penentu Gerak Zaman*, Kanisius, Yogyakarta.
- Lyotard, J.F., 1983, "Presentations" dalam Alan Montefiore (ed), *Philosophy in France Today*, Cambridge University Press, Cambridge.

Lyotard, J.F., 1989, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, Fourth Edition, Manchester University Press, Manchester.

Malcom, N., 1967, "Ludwig Josef Johann Wittgenstein" dalam Paul Edwards (ed), *The Encyclopedia of Philosophy*, Volume VIII, The Macmillan Company & The Free Press, New York.

Notonagoro, 1987, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Cetakan Ketujuh, Bina Aksara, Jakarta.

Peterson, J., 1976, *Realism and Logical Atomism*, The university of Alabama Press, Alabama.

Pitcher, G., 1964, *The Philosophy of Wittgenstein*, Englewood Cliffs, New Jersey.

Pranarka, A.M.W., 1985, *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*, CSIS, Jakarta.

Quirk, R., 1987, *Longman Dictionary of Contemporary English*, Second Edition, Longman Group UK Limited, England.

Ralph I.W., 1948, *The Philosophy of Plotinus*, Third Edition, Longmans, Green and Co, London.

Rockmore, T., 1993, *Before & After Hegel; A Historical Introduction to Hegel's Thought*, University of California Press, California.

Rosenau, P.M., 1992, *Post-Modernism And The Social Sciences: Insights, Inroads, And Intrusions*, Princeton University Press, New Jersey.

Runes, D., 1979, *Dictionary of Philosophy*, Littlefield Adams & Co, Totowa, New Jersey.

Russell, B., 1980, *An Inquiry Into Meaning And Truth*, diterbitkan pertama kali tahun 1940, Reprinted seven times, Unwin Paperbacks, London.

Sartono-Kartodirdjo, 1990, *Kebudayaan Pembangunan Dalam Perspektif Sejarah*,

Cetakan Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Sartono-Kartodirdjo, 1994, *Pembangunan Bangsa tentang Nasionalisme, Kesadaran dan Kebudayaan Nasional*, Aditya Media, Yogyakarta.

Schramm, W., 1993, "Perihal Membangun Jembatan", dalam Deddy Mulyana & Jalaluddin Rakhmat (eds), *Komunikasi Antar Budaya*, Cetakan Kedua, P.T.Remaja Rosdakarya, Bandung.

Soerjanto-Poespowardojo., 1993, *Pembangunan Nasional Dalam Perpektif Budaya; Sebuah Pendekatan Filsafat*, Gramedia, Jakarta.

Soewito-Santoso., 1975, *Sutasoma; A Study in Javanese Wajrayana*, International Academy of Indian Culture, New Delhi.

Sontag, Frederick., 1970, *Problems of Metaphysics*, Chandler Publishing Company, Pennsylvania.

Sullivan, John Edward., 1970, *Prophets Of The West; An Introduction to the Philosophy of History*, Holt, Rinehart and Winston Inc., New York.

Sumaryono, E., 1993, *Hermeneutik; Sebuah Metode Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta.

Van Peursen, C.A., 1969, *Ludwig Wittgenstein; An Introduction to his Philosophy*, Faber and Faber, London.

Verene, Donald Phillip. (Ed), 1979, *Symbol, Myth, and Culture; Essay and Lectures of Ernst Cassirer 1935-1945*, Yale University, Westford, Massachusetts.

White, Alan.R., 1987, *Methods of Metaphysics*, Croom Helm Ltd, New York.

Wittgenstein, L., 1969, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Fourth Impression, with a new Translation by: D.F.Pears & B.F. Mc Guinness, Routledge & Kegan Paul Ltd, London.

Wittgenstein, L., 1983, *Philosophical Investigations*, translated by: G.E.M. Anscombe, Tenth Edition, Basil Blackwell, Oxford.

Yamin, M., 1960, *Pembahasan Undang-undang Dasar Republik Indonesia*, Tanpa Penerbit, Jakarta.